

LAPORAN THESIS

**INTEGRASI PRINSIP *BENEFICENCE* DALAM PROGRAM
TERAPI RUMATAN METADONA DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS DI PROVINSI BALI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

LAPORAN THESIS

INTEGRASI PRINSIP *BENEFICENCE* DALAM PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS DI PROVINSI BALI

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum



AJIB ZAIM ALAMSYAH
NIM 22.C2.0012

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip *beneficence* dalam Program Terapi Rumatan Metadona (PTRM) dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan studi kasus di Provinsi Bali. Hak atas kesehatan adalah komponen penting dari HAM, yang harus dilaksanakan tanpa diskriminasi, termasuk bagi pengguna narkotika. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan seperti stigma sosial, akses terbatas terhadap layanan, dan kurangnya pendekatan berbasis bioetika. Prinsip *beneficence*, yang menekankan pemberian manfaat terbaik bagi pasien, menjadi landasan moral penting dalam PTRM untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik dan hak pasien terpenuhi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi terkait PTRM, mengevaluasi pelaksanaannya di Provinsi Bali, serta menilai sejauh mana prinsip *beneficence* telah diintegrasikan dalam program tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi preskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, studi pustaka, dan analisis regulasi hukum terkait PTRM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi PTRM di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan hukum, utamanya pasal 4 – 7, pasal 53 – 61, pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor No. 57 Tahun 2013. Namun, masih terdapat kekosongan aturan yang kurang sepenuhnya mendukung prinsip *beneficence*, terutama dalam perlindungan hukum bagi pasien, pengaturan biaya rehabilitasi, serta keterbatasan akses layanan PTRM. Implementasi juga mengalami tantangan, seperti masalah pemberian dosis yang tidak sesuai, dan minimnya edukasi yang membuat manfaat terapi yang diterima pasien tidak optimal. Kurangnya layanan konseling psikososial juga menimbulkan kurangnya penghargaan pada pasien. Selain itu, stigma terhadap pengguna narkotika memperburuk kondisi sosial pasien, menghalangi mereka dari akses ke layanan kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan pendekatan berbasis HAM dalam PTRM dengan Penguatan regulasi utamanya di level *code of conduct*, memastikan ketersediaan layanan, meningkatkan keterjangkauan, dan menghapus stigma. Selain itu, pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang bioetika dan HAM juga diperlukan untuk mendukung implementasi prinsip *beneficence* secara optimal.

Kata Kunci: *Beneficence*, metadona, hak asasi manusia, bioetika, narkotika.

ABSTRACT

This research explores the application of the beneficence principle in the Methadone Maintenance Therapy Program from a human rights perspective, focusing on a case study in Bali Province. The right to health is a fundamental component of HR that must be upheld without discrimination, including for narcotics users. However, the implementation of PTRM faces challenges such as social stigma, limited access to services, and lack of a bioethical approach. Beneficence, emphasizing optimal benefits for patients, serves as a moral foundation to ensure better quality of life and fulfillment of patients' rights.

The study aims to analyze PTRM-related regulations, evaluate its implementation in Bali, and assess the integration of the beneficence principle within the program. A sociological juridical approach with prescriptive specifications was employed. Data were gathered through stakeholder interviews, literature reviews, and legal analysis of PTRM-related regulations.

The research findings indicate that PTRM regulations in Indonesia have been established through various legal frameworks, such as Law No. 17 of 2023 on Health, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Government Regulation No. 28 of 2024, and Minister of Health Regulation No. 57 of 2013. However, gaps remain in these regulations, which do not fully support the principle of beneficence, particularly in terms of legal protection for patients, the regulation of rehabilitation costs, and the accessibility of PTRM services. Implementation also faces challenges, including inconsistent dosing practices and a lack of education, which limits the therapeutic benefits received by patients. The absence of adequate psychosocial counseling services further results in a lack of recognition of patients' needs. Additionally, stigma against drug users worsens their social conditions, preventing them from accessing healthcare services. This study recommends adopting a human rights-based approach in PTRM by strengthening regulations, particularly at the code of conduct level, ensuring service availability, improving affordability, and eliminating stigma. Furthermore, training healthcare professionals in bioethics and human rights is essential to support the optimal implementation of the principle of beneficence.

Keywords: *Beneficence, methadone, human rights, bioethics, narcotics*